

---

## FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PEMILIHAN CALON LEGISLATIF TAHUN 2024

<sup>1)</sup>Orinsa Nangus

<sup>2\*)</sup>Herman Yosef Nende Lingge Kumanireng

<sup>1-3)</sup>Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat (STPM) Santa Ursula Ende,  
Indonesia

\*Corresponding Email: hermanyn@gmail.com

---

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi perempuan dalam pemilihan calon legislatif tahun 2024. Untuk mencapai tujuan tersebut, peneliti menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan partisipasi perempuan dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi pendidikan, peran dan dukungan keluarga, serta kemauan dari dalam diri perempuan. Faktor meliputi budaya eksternal dan peran lokal yang mendorong perempuan untuk lebih aktif dalam politik. Temuan ini sejalan dengan teori partisipasi politik yang menekankan pentingnya keterlibatan perempuan dalam pemilu guna meningkatkan kepekaan, kesadaran, dan komitmen terhadap keadilan gender. Partisipasi perempuan juga berkontribusi pada penguatan pemahaman terkait kebijakan advokasi dan mendorong minat perempuan untuk aktif dalam organisasi atau lembaga politik. Peneliti memberikan beberapa langkah strategi untuk meningkatkan partisipasi perempuan di masa mendatang. *Pertama*, perempuan diharapkan lebih aktif dalam kegiatan politik dan terus mendorong kesetaraan gender, agar tidak hanya fokus pada peran domestik tetapi juga mampu berkontribusi dalam berbagai aspek politik. *Kedua*, pemerintah desa diharapkan mengadakan sosialisasi secara berkala, setidaknya sekali dalam setahun atau menjelang pemilu, mengenai pentingnya partisipasi politik perempuan. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran bahwa perempuan memiliki hak yang setara untuk memilih dan dipilih dalam proses politik.

**Kata kunci** : partisipasi perempuan, pemilu legislatif, keadilan gender, faktor internal, faktor eksternal.

### ABSTRACT

*This study aims to identify factors that influence women's participation in the 2024 legislative candidate elections. To achieve this goal, researchers used interview and documentation methods. The results of the study indicate that increasing women's participation is influenced by internal and external factors. Internal factors include education, family roles and support, and the will of women. Factors include external culture and local roles that encourage women to be more active in politics. This finding is in line with the theory of political participation which emphasizes the importance of women's involvement in elections in order to increase sensitivity, awareness, and commitment to gender justice. Women's participation also contributes to strengthening understanding of advocacy policies and encouraging women's interest in being active in political organizations or institutions. Researchers provide several strategic steps to increase women's participation in the future. First, women are expected to be more active in political activities and continue to encourage gender equality, so that they do not only focus on domestic roles but are also able to contribute to various aspects of politics. Second, the village government is expected to hold regular socialization, at least once a year or before the election, regarding the importance of women's political participation. This*

---

*socialization aims to increase awareness that women have equal rights to vote and be elected in the political process.*

**Keywords:** *women's participation, legislative elections, gender justice, internal factors, external factors.*

## **PENDAHULUAN**

Partisipasi politik merujuk pada keterlibatan warga dalam berbagai tahapan proses politik, mulai dari pengambilan hingga evaluasi keputusan. Miriam Budiardjo (Budiardjo, 2008) mendefinisikan partisipasi politik sebagai aktivitas individu atau kelompok untuk berperan aktif dalam kehidupan politik, seperti memilih pemimpin, memengaruhi kebijakan publik, menghadiri rapat umum, bergabung dengan partai atau kelompok kepentingan, hingga berkomunikasi dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen. Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Ramlan Surbakti (Surbakti, 1998), yang menjelaskan bahwa partisipasi politik adalah keterlibatan warga negara dalam menentukan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Definisi ini menegaskan bahwa partisipasi politik mencakup segala bentuk keterlibatan warga dalam proses politik dan pemerintahan untuk memengaruhi jalannya kebijakan, yang pada akhirnya berdampak pada kehidupan masyarakat secara luas.

Dalam konteks sistem demokrasi, partisipasi politik memainkan peran penting sebagai wujud kedaulatan rakyat. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota legislatif (DPR, DPD, DPRD), Presiden, dan Wakil Presiden. Pemilu dilaksanakan berdasarkan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 menekankan pentingnya penyelenggara pemilu yang berkualitas untuk mewujudkan pemerintahan demokratis yang mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Profesionalitas, integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas penyelenggara pemilu menjadi faktor kunci dalam menjamin hak politik masyarakat serta meningkatkan kualitas pemilu sebagai instrumen demokrasi (Khalisa Aisyah Signora et al., 2023; Liando, 2016; Sarbaini, 2015).

Salah satu dimensi penting partisipasi politik adalah keterlibatan perempuan dalam proses politik. Bentuk partisipasi ini mencakup kontribusi pemikiran, tenaga, dan keikutsertaan dalam program kerja, termasuk di bidang politik (Nursyifa, 2023; Pratiwi, 2024). Sejarah menunjukkan bahwa kondisi partisipasi perempuan di bidang politik telah mengalami perubahan signifikan. Pada era reformasi, peran perempuan dalam politik semakin meluas, termasuk menjadi anggota parlemen. Perubahan sosial-budaya yang terjadi pada era reformasi memberikan peluang baru bagi perempuan untuk terlibat dalam politik. Peluang ini diiringi dengan upaya sistematis untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam struktur politik formal. Salah satu langkah strategis yang dapat dilakukan adalah mengoptimalkan implementasi kuota perempuan dalam daftar calon legislatif sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan (Hamdani et al., 2023; Iman, 2023; Muhammad Ar Rafii, 2024). Kuota ini bertujuan untuk memastikan keterwakilan perempuan dalam parlemen sebagai salah satu instrumen mewujudkan keadilan gender.

Namun, meskipun terdapat perkembangan positif, perempuan Indonesia masih menghadapi berbagai kendala dalam partisipasi politik. Keterlibatan perempuan dalam politik sering dipengaruhi oleh adat atau kebiasaan, peluang resmi, sumber daya sosial seperti keterampilan, serta dorongan pribadi. Hambatan internal, seperti kurangnya kepercayaan diri dan pengetahuan, menjadi tantangan utama yang menghalangi perempuan untuk berpartisipasi aktif. Selain itu, hambatan eksternal seperti budaya patriarki dan stereotip

gender masih mengakar kuat dalam masyarakat (Annisa Risky Zuniati, Raisha Maulidza, Najwa Sabilla, 2024; Astari, 2020; Frans Bapa Tokan, Apolonaris Gai, 2020; Nurdin, 2021; Nursyifa, 2023; Rusta et al., 2024; Sarmin, 2024; Totok Inwantoro, Yuwanto Herawati, 2014). Kedua faktor ini sering kali membatasi ruang gerak perempuan di ranah politik, yang secara tradisional dianggap sebagai wilayah dominasi laki-laki. Dalam konteks politik formal, meskipun perangkat hukum telah mendukung partisipasi perempuan, tingkat keterwakilan mereka masih jauh lebih rendah dibandingkan laki-laki. Bahwa politik sering kali diasosiasikan sebagai ranah publik yang lebih dominan bagi laki-laki (Al-Ma'Arij et al., 2023; Putrie Hanum Jayani, Fathiya Mayla Shafira, Satria Anindya, 2024; Totok Inwantoro, Yuwanto Herawati, 2014).

Rendahnya partisipasi perempuan dalam politik formal menjadi tantangan besar bagi terciptanya keadilan gender di Indonesia. Padahal, keterlibatan perempuan dalam politik, memiliki dampak strategis untuk meningkatkan kepekaan, kesadaran, dan komitmen terhadap isu-isu keadilan gender (Muhammad Ar Rafii, 2024; Putri & Putri, 2021). Selain itu, partisipasi perempuan dalam politik juga berpotensi memperdalam pemahaman advokasi kebijakan serta mendorong peran aktif perempuan dalam organisasi politik. Dengan keterlibatan yang lebih besar, perempuan dapat memainkan peran penting dalam mendukung kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya kelompok rentan (Nursyifa, 2023). Dengan demikian partisipasi politik perempuan merupakan indikator penting bagi kualitas demokrasi suatu negara. Tingkat partisipasi yang rendah mencerminkan adanya ketimpangan gender yang masih perlu diatasi melalui kebijakan afirmatif dan pemberdayaan perempuan. Dengan keterlibatan yang lebih besar dalam politik, perempuan dapat berkontribusi secara signifikan dalam membangun masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan demokratis (Aperta Safatullah et al., 2024; Frans Bapa Tokan, Apolonaris Gai, 2020).

Salah satu bentuk nyata partisipasi perempuan dalam politik adalah keterlibatan perempuan dalam memilih pemimpin pada pemilihan umum (Pemilu). Hak suara perempuan merupakan manifestasi dari prinsip demokrasi yang menjunjung tinggi kesetaraan gender dan kedaulatan rakyat (Aperta Safatullah et al., 2024; Mahmudah, 2023; Putrie Hanum Jayani, Fathiya Mayla Shafira, Satria Anindya, 2024). Pemilu memberikan kesempatan bagi perempuan untuk mengekspresikan aspirasi politik mereka, menentukan arah kebijakan publik, dan memastikan bahwa kebutuhan serta perspektif mereka turut menjadi perhatian dalam pengambilan keputusan politik. Dalam konteks Pemilu, keterlibatan perempuan memiliki dampak strategis. Pilihan politik perempuan tidak hanya mencerminkan kepentingan individu, tetapi juga berpotensi mendorong kebijakan yang lebih inklusif, responsif, dan berkeadilan. Perempuan sebagai pemilih memiliki peluang untuk mendukung calon-calon pemimpin yang memperjuangkan isu-isu seperti keadilan gender, akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi (Aperta Safatullah et al., 2024). Partisipasi perempuan dalam Pemilu tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga memiliki kontribusi nyata dalam menciptakan masyarakat yang lebih inklusif. Namun, meskipun hak pilih perempuan telah diakui secara hukum, tantangan dalam meningkatkan partisipasi mereka masih ada. Hambatan seperti kurangnya pemahaman politik, stereotip gender, dan pengaruh budaya patriarki dapat mengurangi motivasi perempuan untuk menggunakan hak pilihnya (Frans Bapa Tokan, Apolonaris Gai, 2020; Hariyanti et al., 2018; Medina, 2023; Nursyifa, 2023).

Dalam konteks masyarakat lokal pedesaan seperti di Desa Rana Gapang Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur, menunjukkan gambaran empiris yang menarik terkait keterlibatan perempuan dalam Pemilu tahun 2024. Desa ini memiliki total penduduk

sebanyak 1.588 jiwa, yang terdiri dari 790 laki-laki dan 798 perempuan. Dari total penduduk tersebut, 894 jiwa telah terdaftar sebagai pemilih tetap, terdiri dari 434 laki-laki dan 460 perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa secara kuantitatif, jumlah perempuan yang terdaftar sebagai pemilih tetap lebih banyak dibandingkan laki-laki, mencerminkan kesadaran yang relatif lebih tinggi di kalangan perempuan untuk terlibat dalam proses demokrasi. Namun, data juga menunjukkan adanya 84 orang yang tidak mengikuti Pemilu, terdiri dari 50 perempuan dan 34 laki-laki. Alasan utama ketidakterlibatan perempuan mencakup faktor-faktor seperti meninggal dunia, melanjutkan pendidikan di luar kota, tidak memiliki KTP, atau sedang bekerja di daerah lain.

**Tabel 1.**  
Tabel Daftar Pemilih Tetap

| No            | TPS     | Daftar Pemilih Tetap |            |
|---------------|---------|----------------------|------------|
|               |         | L                    | P          |
| 1             | Compang | 104                  | 115        |
| 2             | Ledu    | 115                  | 120        |
| 3             | Weong   | 110                  | 115        |
| 4             | Tirus   | 105                  | 110        |
| <b>Jumlah</b> |         | <b>434</b>           | <b>460</b> |

Sumber Data: Panitia Pemilihan Umum Desa Rana Gapang Tahun 2024

Dari distribusi partisipasi per TPS, terdapat kecenderungan bahwa keterlibatan perempuan di TPS tertentu, seperti TPS Compang dan TPS Tirus, sedikit lebih rendah dibandingkan laki-laki. Hal ini dapat dilihat dari jumlah perempuan yang tidak ikut Pemilu di TPS tersebut, yaitu masing-masing 10 dan 12 orang. Sebaliknya, TPS Weong memiliki jumlah perempuan yang tidak ikut Pemilu paling banyak, yaitu 15 orang. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah pemilih perempuan lebih tinggi, tingkat partisipasi faktual mereka masih dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti mobilitas geografis dan kendala administratif.

**Tabel 2.**  
Tabel DPT Yang Ikut Dan Tidak Ikut Pemilu

| TPS           | DPT Yang Ikut Pemilu |            | DPT Yang Tidak Ikut Pemilu |           |
|---------------|----------------------|------------|----------------------------|-----------|
|               | L                    | P          | L                          | P         |
|               | Compang              | 90         | 100                        | 7         |
| Ledu          | 110                  | 105        | 9                          | 13        |
| Weong         | 120                  | 103        | 10                         | 15        |
| Tirus         | 80                   | 102        | 8                          | 12        |
| <b>Jumlah</b> | <b>400</b>           | <b>410</b> | <b>34</b>                  | <b>50</b> |
|               | <b>810</b>           |            | <b>84</b>                  |           |

Sumber Data: Panitia Pemilihan Umum Desa Rana Gapang Tahun 2024

Kecenderungan tersebut menjadi landasan empirik penting untuk memahami dinamika partisipasi perempuan dalam Pemilu, khususnya di masyarakat pedesaan seperti Desa Rana Gapang. Mengingat adanya tantangan sosial, budaya, dan struktural yang dapat memengaruhi tingkat keterlibatan mereka dalam proses politik formal. Kondisi ini mengindikasikan perlunya upaya untuk mengeksplorasi dinamika partisipasi perempuan di daerah pedesaan, yang sering kali diabaikan dalam studi-studi politik yang lebih banyak berfokus pada kawasan urban. Misalnya, penelitian (Dewi Purnamasari, 2021; Putri & Putri, 2021)

menyoroti aspek partisipasi perempuan dalam Pemilu Legislatif 2019 dengan fokus pada faktor-faktor yang memengaruhi serta bentuk partisipasi yang dilakukan. Penelitian (Dewi Purnamasari, 2021) menemukan bahwa partisipasi perempuan bervariasi berdasarkan tingkat informasi dan pengetahuan mereka tentang partai politik, calon legislatif, serta visi dan misi yang ditawarkan. Sebagian perempuan menggunakan hak pilihnya berdasarkan informasi yang cukup, sedangkan sebagian lainnya memilih tanpa memiliki pengetahuan mendalam. Selain itu, terdapat kelompok perempuan yang tidak menggunakan hak pilih meskipun memiliki informasi, karena kurangnya keyakinan terhadap efektivitas proses politik dalam membawa perubahan. Sementara itu, penelitian (Putri & Putri, 2021) mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi perempuan di Kecamatan Koto Tangah, Padang. Faktor-faktor tersebut meliputi kesadaran politik, tingkat kepercayaan terhadap pemerintah, status sosial-ekonomi, serta dukungan keluarga. Bentuk partisipasi perempuan dalam konteks ini mencakup pemberian suara, keterlibatan sebagai panitia pemilu, serta partisipasi dalam diskusi politik.

Keterlibatan perempuan Desa Rana Gapang dalam pemilu tahun 2024, sebagaimana ditunjukkan dengan jumlah penduduk perempuan yang signifikan dan tingkat partisipasi yang bervariasi, menawarkan konteks yang relevan untuk menggali potensi, tantangan, dan peluang perempuan dalam menjalankan hak pilih mereka. Meskipun kedua penelitian terdahulu menunjukkan adanya peningkatan peran perempuan dalam politik, hasilnya juga mengungkapkan bahwa partisipasi perempuan belum optimal. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian terdahulu dalam hal fokus pada perempuan dan faktor-faktor partisipasi pemilu, namun penelitian ini berbeda dari sisi lokasi yakni konteks lokal. Dengan demikian artikel penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dinamika partisipasi perempuan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya di daerah pedesaan Rana Gapang Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur. Memahami dinamika ini tidak hanya penting untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam Pemilu, tetapi juga untuk mengidentifikasi kebijakan yang dapat mendukung keterlibatan mereka secara berkelanjutan dalam proses politik.

## **LANDASAN TEORI**

### **Teori Partisipasi politik**

Partisipasi politik merupakan aspek fundamental dalam kehidupan demokrasi, yang mencakup keikutsertaan individu atau kelompok dalam kegiatan politik untuk memengaruhi kebijakan publik. Miriam Budiardjo (Budiardjo, 2007) mendefinisikan partisipasi politik sebagai kegiatan aktif warga negara dalam memilih pemimpin atau memengaruhi kebijakan pemerintah. Ramlan Surbakti (Surbakti, 1998) menegaskan bahwa partisipasi politik memberi kesempatan bagi warga negara untuk memengaruhi isi kebijakan dan keputusan politik yang memengaruhi kehidupan mereka. Dalam konteks demokrasi, partisipasi politik adalah komponen utama yang memungkinkan masyarakat berkontribusi pada proses pengambilan keputusan negara. Tanpa partisipasi masyarakat, demokrasi tidak akan tercipta. Partisipasi ini mencakup peran serta aktif dalam memberikan saran, pendapat, dan dukungan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perempuan, khususnya, memiliki peran penting dalam partisipasi politik, yang sebelumnya terbatas pada ruang domestik. Kini, perempuan tidak hanya memiliki akses pendidikan tetapi juga peluang untuk berkontribusi dalam menentukan arah kebijakan publik, termasuk memberikan suara dalam pemilu (Hananda Avivah, 2023).

Partisipasi dapat terjadi secara individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, serta damai atau dengan kekerasan. Partisipasi politik mencakup keikutsertaan warga dalam

pengambilan keputusan, mulai dari perencanaan hingga kegiatan pelestarian, dengan prinsip keterlibatan aktif masyarakat melalui kontribusi tenaga, pikiran, atau materi (Frans Bapa Tokan, Apolonaris Gai, 2020; Mas'ued & Savirani, 2017; Sinaga, Manotar Leryaldo, 2024). Gabriel Almond (Mohtar Mas'ued, 2021) mengklasifikasikan partisipasi politik ke dalam dua bentuk. Partisipasi politik konvensional mencakup tindakan yang dilakukan sesuai prosedur yang wajar, seperti pemungutan suara dan kampanye damai. Sebaliknya, partisipasi politik non-konvensional melibatkan cara-cara di luar prosedur formal, yang sering kali ilegal atau menggunakan kekerasan (Mohtar Mas'ued, 2021; Nurbaiti, 2019).

Partisipasi perempuan dalam politik memiliki arti penting dalam membangun kesetaraan gender dan meningkatkan peran perempuan dalam ranah publik. Perempuan tidak lagi terkungkung dalam peran domestik semata, tetapi harus mampu berbicara dan menentukan arah bangsa melalui partisipasi politik (Frans Bapa Tokan, Apolonaris Gai, 2020). Dengan pendidikan yang lebih baik dan peluang yang setara, perempuan kini dapat memainkan peran aktif dalam proses politik, termasuk pemilu. Secara keseluruhan, partisipasi politik adalah bentuk nyata dari keterlibatan masyarakat dalam demokrasi. Hal ini memungkinkan individu dan kelompok memengaruhi kebijakan publik secara langsung maupun tidak langsung, baik melalui cara-cara formal maupun alternatif. Partisipasi perempuan, khususnya, menjadi langkah strategis dalam mendorong inklusi gender dan menciptakan kebijakan yang lebih representatif.

### **Partisipasi Politik Perempuan**

Partisipasi politik perempuan merujuk pada keterlibatan perempuan dalam kegiatan politik tersebut. Meski ada pengakuan terhadap hak-hak politik perempuan dalam konstitusi, praktik di lapangan menunjukkan bahwa partisipasi politik perempuan di Indonesia masih terbilang rendah. Partisipasi perempuan dalam politik mencerminkan tingkat keadilan dalam demokrasi yang sedang berusaha diwujudkan di Indonesia. Partisipasi ini tidak datang begitu saja, melainkan memerlukan kesadaran dan kepedulian masyarakat yang mendalam. Namun, meskipun ada dorongan untuk kesetaraan gender, panggung politik Indonesia masih didominasi oleh laki-laki (Frans Bapa Tokan, Apolonaris Gai, 2020; Nursyifa, 2023).

Partisipasi politik perempuan di Indonesia, meskipun diatur oleh berbagai perangkat hukum, masih mengalami kendala yang signifikan. Meskipun Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 telah melegitimasi partisipasi politik bagi perempuan, pada kenyataannya, masih ada kesenjangan yang membuat perempuan sulit untuk terlibat secara aktif dalam dunia politik. Perempuan sering kali dihadapkan pada dilema antara tuntutan untuk berkontribusi dalam pembangunan nasional dan kodrat sosial yang mengharuskan mereka untuk tetap memfokuskan diri pada peran domestik. Hal ini menambah kompleksitas dalam mendorong partisipasi politik perempuan, mengingat budaya dan nilai-nilai sosial yang mengikat (Putrie Hanum Jayani, Fathiya Mayla Shafira, Satria Anindya, 2024).

Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi perempuan dalam pemilihan umum dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal mencakup aspek pendidikan, keluarga, dan dari dalam diri perempuan itu sendiri. Segi pendidikan memainkan peran penting dalam membatasi atau membuka peluang perempuan untuk berpartisipasi dalam politik (Al-Ma'Arij et al., 2023). Ketimpangan dalam akses pendidikan antara laki-laki dan perempuan sering kali membuat perempuan tertinggal dalam hal pengetahuan dan pemahaman tentang politik, yang menghalangi mereka untuk mengambil bagian dalam proses politik. Pendidikan yang rendah juga berdampak pada keterbatasan perempuan dalam membangun jaringan sosial dan politik di ruang publik. Segi

keluarga juga mempengaruhi partisipasi politik perempuan (Annisa Risky Zuniati, Raisha Maulidza, Najwa Sabilla, 2024). Di banyak masyarakat, perempuan masih dianggap sebagai individu yang harus mengikuti keputusan suami atau ayah dalam urusan politik. Budaya patriarki yang masih dominan menganggap perempuan sebagai pelayan laki-laki, yang membuat perempuan tidak diberi kebebasan untuk menentukan pilihan politik mereka sendiri (Astari, 2020). Keterbatasan dukungan dari keluarga ini menjadi hambatan yang signifikan dalam mendorong perempuan untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum (Hatta Azzuhri, Tiara Ningsih, Kun Budianto, 2018).

Selain itu, faktor internal yang juga mempengaruhi partisipasi perempuan adalah sikap perempuan itu sendiri terhadap politik. Beberapa perempuan merasa kurang percaya diri atau ragu-ragu dalam berpartisipasi politik, sering kali karena pencitraan sosial yang menggambarkan perempuan sebagai makhluk lemah yang tidak mampu mengelola urusan politik. Hal ini menyebabkan perempuan merasa tidak memiliki kapasitas atau kemampuan untuk terlibat dalam proses politik, yang pada gilirannya mengurangi partisipasi mereka (Al-Ma'Arij et al., 2023; Putri & Putri, 2021). Faktor eksternal yang memengaruhi partisipasi politik perempuan mencakup budaya dan peran lokal. Budaya masyarakat yang masih memandang perempuan sebagai entitas yang terpisah dari dunia politik menjadi penghalang utama dalam meningkatkan partisipasi perempuan. Dalam banyak kasus, perempuan cenderung mengikuti pilihan politik laki-laki, baik itu ayah, suami, atau tokoh masyarakat yang memegang kendali dalam keputusan politik. Ini menunjukkan bagaimana budaya patriarki masih mendominasi, bahkan dalam pemilihan umum (Inwantoro et al., 2014; Medina, 2023; Nursyifa, 2023).

Peran lokal juga mempengaruhi partisipasi perempuan. Di banyak daerah, tokoh masyarakat atau pemimpin lokal mungkin tidak memberikan dukungan yang cukup kepada perempuan untuk terlibat dalam politik. Faktor lingkungan yang tidak mendukung serta pendidikan yang kurang di kalangan masyarakat lokal memperburuk situasi ini. Tanpa dukungan dari tokoh masyarakat atau lingkungan sekitar, perempuan merasa kurang diberdayakan untuk mengambil bagian dalam kehidupan politik. Kultur sosial yang masih menganggap perempuan sebagai entitas yang seharusnya mengurus rumah tangga menghambat perempuan untuk terlibat dalam politik. Pandangan ini mengarah pada penolakan terhadap ide perempuan yang terlibat dalam urusan publik, termasuk politik (Putrie Hanum Jayani, Fathiya Mayla Shafira, Satria Anindya, 2024). Faktor psikologis juga memainkan peran penting, di mana perempuan sering merasa rendah diri dan tidak memiliki rasa percaya diri untuk bersaing dengan laki-laki dalam politik. Rasa tidak percaya diri ini membuat perempuan enggan melanjutkan perjalanan politik mereka, yang pada akhirnya mengurangi tingkat partisipasi mereka dalam pemilu (Astari, 2020; SARMIN, 2024; Totok Inwantoro, Yuwanto Herawati, 2014).

Dari berbagai pandangan yang ada, dapat disimpulkan bahwa partisipasi politik perempuan sangat bergantung pada dukungan dari keluarga, lingkungan, serta perubahan budaya yang lebih mendukung kesetaraan gender. Dengan dukungan tersebut, perempuan dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemilu dan berkontribusi dalam politik, tidak hanya sebagai ibu rumah tangga atau istri, tetapi juga sebagai individu yang memiliki suara dalam menentukan arah kebijakan negara. Dukungan keluarga dan lingkungan menjadi faktor penting untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada dan meningkatkan partisipasi politik perempuan di masa depan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang menurut (Sugiyono, 2018) didasarkan pada paradigma post-positivisme. Penelitian dilakukan dalam situasi alami dengan peneliti sebagai instrumen utama. Teknik pengumpulan data menggunakan metode triangulasi, dengan analisis data bersifat induktif dan fokus pada pemaknaan daripada generalisasi. Pendekatan ini dipilih untuk memahami alasan partisipasi perempuan dalam pemilu legislatif 2024 di Desa Rana Gapang, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur. Unit analisis penelitian adalah pemilih perempuan di desa tersebut, dengan enam sumber yang dipilih melalui purposive sampling, yaitu seleksi berdasarkan kriteria tertentu untuk mendapatkan informasi yang relevan (Sugiyono, 2018). Data dikumpulkan melalui dua metode utama. Pertama, wawancara, sebagaimana diuraikan yaitu pengumpulan informasi melalui tanya jawab langsung yang bertujuan mengidentifikasi partisipasi perempuan dalam pemilu. Kedua, dokumentasi yang digunakan untuk memperoleh data langsung dari sumber, seperti dokumen, laporan, dan foto terkait (Hasan, 2022). Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan informasi ke dalam pola, kategori, dan deskripsi tematik. Proses ini melibatkan analisis logistik untuk menghubungkan tema utama dan menggunakan kerangka teori tertentu guna menghasilkan kesimpulan yang mendalam (Hasan, 2022). Metode ini memungkinkan peneliti mengeksplorasi dinamika partisipasi politik perempuan dalam konteks lokal secara menyeluruh dan bermakna.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Perempuan Dalam Pemilihan Calon Legislatif Tahun 2024 di Desa Rana Gapang**

Data lapangan menunjukkan bahwa bentuk partisipasi perempuan dalam pemilihan calon legislatif dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal antara lain: Pendidikan, keluarga dan faktor dari dalam diri sendiri sedangkan faktor eksternal yaitu budaya dan peran lokal. Berikut ini akan diuraikan lebih lanjut beberapa temuan data lapangan yang berkaitan dengan bentuk partisipasi perempuan dalam pemilihan calon legislatif 2024.

#### **Faktor Internal**

##### **1. Faktor Pendidikan**

Data lapangan menunjukkan bahwa faktor Pendidikan mempengaruhi pengetahuan, keterampilan serta memberikan ruang kepada kaum Perempuan agar kaum perempuan berpartisipasi dalam pemilihan calon legislatif tahun 2024. Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa partisipasi politik kaum perempuan pada saat pemilu 2024 ini dipengaruhi oleh faktor Pendidikan. Tingginya partisipasi politik perempuan di desa Rana Gapang tentunya karena ada faktor Pendidikan. Di mana dengan adanya faktor pendidikan dapat membantu kaum perempuan dalam meningkatkan pengetahuan bahwa pentingnya kaum perempuan menggunakan hak pilihnya pada saat kegiatan politik. Sehingga pada saat pemilihan calon legislatif di tanggal 14 Februari 2024 lalu kaum perempuan hampir semua mengikuti pemilu karena memiliki kesempatan dalam menggunakan hak suaranya.

Pendidikan merupakan upaya untuk mengembangkan potensi internal individu melalui pengalaman belajar, baik dalam bentuk pendidikan formal, nonformal, maupun informal. Proses ini berlangsung seumur hidup, baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah, dengan tujuan mengoptimalkan kemampuan individu agar dapat menjalankan peran hidupnya secara efektif di masa depan. Pendidikan memiliki hubungan yang sangat erat dengan partisipasi politik (Budiardjo, 2008), di mana melalui Pendidikan, perempuan dapat meningkatkan pemahaman tentang isu politik, hak politik dan pentingnya kaum perempuan



terlibat dalam kegiatan politik. Pendidikan juga dapat membantu kaum perempuan dalam memperjuangkan kesetaraan gender di dunia politik. Dengan memahami itu kaum Perempuan dapat berkontribusi dalam memperjuangkan keadilan gender. Pendidikan politik dapat memberikan rasa percaya diri serta kemandirian kepada kaum perempuan untuk berbicara atas nama kaum perempuan sendiri dalam ranah politik dengan ilmu yang diperoleh melalui pendidikan politik kaum perempuan dapat menjadi agen perubahan dalam masyarakat dan politik. Pendidikan politik memiliki peran dalam meningkatkan kesadaran, partisipasi, kesadaran gender, dan kemandirian Perempuan dalam politik, menciptakan jalan menuju kesetaraan gender dan partisipasi politik perempuan (Hamdani et al., 2023; Hariyanti et al., 2018; Khalisa Aisyah Signora et al., 2023).

Pendidikan politik merupakan salah satu jalan untuk kaum perempuan belajar politik, dengan adanya pendidikan kaum perempuan mengetahui bahwa dia juga berhak memberikan hak suaranya pada saat pemilihan umum. Pendidikan bisa membuat kaum perempuan mengerti akan dirinya yang tidak hanya menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga melainkan bisa berpartisipasi dalam kegiatan politik. Dengan demikian peneliti berpendapat bahwa dengan adanya faktor pendidikan dapat membuat kaum perempuan berpartisipasi dalam pemilihan calon legislatif tahun 2024, dimana melalui faktor pendidikan ini kaum perempuan lebih berpartisipasi aktif dalam kegiatan politik daripada dari tahun-tahun sebelumnya.

## **2. Faktor Keluarga**

Data lapangan menunjukkan bahwa Faktor keluarga dapat mempengaruhi serta meningkatkan rasa kepercayaan diri kaum Perempuan dalam pemilihan umum legislatif tahun 2024. Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa peran dan dukungan dari keluarga merupakan suatu dorongan bagi kaum perempuan agar bisa berpartisipasi aktif dalam kegiatan politik, peran dan dukungan keluarga juga dapat menumbuhkan rasa kepercayaan diri kaum perempuan dalam melakukan segala kegiatan yang berkaitan dengan politik, di mana peran dan dukungan yang diberikan akan menjadi motivasi bagi kaum perempuan agar kaum perempuan terus terlibat aktif pada saat pemilihan umum dilaksanakan. Peran dan dukungan yang diberikan oleh keluarga dapat menjadi suatu pelajaran yang berharga bagi kaum perempuan dan merasa keputusannya didukung.

Faktor keluarga adalah faktor yang diperankan oleh lingkungan keluarga seseorang dalam membentuk perilaku, nilai-nilai dan perkembangan seseorang tersebut. Faktor keluarga juga dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan individu. Faktor keluarga memiliki hubungan yang signifikan dalam memahami perilaku seseorang. Menekankan kehidupan masyarakat khususnya kaum perempuan agar terlibat aktif dalam menentukan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka (Budiardjo, 2008). Dari segi faktor keluarga memiliki peran penting dalam membentuk sikap dan perilaku politik seorang khususnya kaum perempuan. Lingkungan keluarga dapat menjadi tempat awal dimana seseorang terpapar pada nilai-nilai politik dan cara berpartisipasi dalam kehidupan politik. Keluarga dapat menjadi agen sosialisasi politik yang mempengaruhi pemahaman seseorang terhadap politik dan memberikan dorongan kepada kaum perempuan untuk terlibat aktif dalam kegiatan politik (Al-Ma'Arij et al., 2023; Astari, 2020; Violin et al., 2024).

Dengan demikian peneliti berpendapat bahwa peran dan dukungan keluarga memiliki pengaruh yang sangat besar. Di mana kaum perempuan di Desa Rana Gapang sangat antusias dalam mengikuti pemilihan calon legislatif tahun 2024, Tentunya partisipasi kaum Perempuan tersebut tidak luput dari peran dan dukungan keluarga mereka masing-masing, peran dan dukungan yang diberikan oleh keluarga akan membuat kaum perempuan tambah bersemangat

dalam mengikuti kegiatan partisipasi politik. Keluarga memberikan dukungan yang positif membuat kemauan serta rasa kepercayaan diri Perempuan meningkat untuk terlibat dalam kegiatan politik. Dukungan yang diberikan dari keluarga itu dalam bentuk dukungan emosional maupun dukungan praktis, seperti membantu mengerjakan tugas kaum perempuan dalam rumah tangga agar kaum perempuan memiliki waktu untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik khususnya dalam pemilihan umum, dan itu merupakan faktor penting dalam memotivasi kaum perempuan untuk terlibat.

### **3. Kemauan Dari Dalam Diri**

Data lapangan menunjukkan bahwa Faktor kemauan dari dalam diri dapat mempengaruhi rasa kesadaran kaum Perempuan akan pentingnya partisipasi Perempuan dalam pemilihan calon legislatif tahun 2024. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber di lapangan yaitu kaum perempuan di desa Rana Gapang mengatakan bahwa kemauan dari dalam diri dapat menumbuhkan rasa kesadaran mereka akan pentingnya partisipasi politik. Sehingga kaum perempuan memiliki kesempatan dalam mengikuti pemilihan calon legislatif, serta dapat akses ke dunia politik. Dengan adanya faktor kemauan juga dapat meningkatkan kesadaran kaum Perempuan akan pentingnya berpartisipasi dalam kegiatan politik. Faktor kemauan ini juga membuat kaum Perempuan merasa terdorong agar selalu melibatkan diri dalam kegiatan politik, karena ini merupakan kesempatan bagi kaum Perempuan untuk berpartisipasi secara langsung dalam menentukan kebijakan publik melalui melalui hak suara mereka (Putrie Hanum Jayani, Fathiya Mayla Shafira, Satria Anindya, 2024).

Faktor kemauan dari dalam diri memiliki hubungan yang erat dalam konteks partisipasi Perempuan dalam kegiatan politik. Kemauan dari dalam diri yang biasa disebut motivasi atau dorongan dapat memberikan ruang untuk kaum Perempuan agar terlibat dalam kegiatan politik. Kemauan dari dalam diri juga dapat menjadi memotivasi bagi kaum Perempuan dalam menyampaikan aspirasi politiknya. Ketika kaum Perempuan memiliki keinginan yang kuat dalam memperjuangkan isu-isu kesetaraan gender, kemauan tersebut dapat menjadi faktor penentu dalam partisipasi politik mereka (Inwantoro et al., 2014; Nursyifa, 2023; Putrie Hanum Jayani, Fathiya Mayla Shafira, Satria Anindya, 2024). Kemauan dari dalam diri juga dapat membantu kaum perempuan dalam menentang penilaian gender terhadap kaum perempuan berdasarkan persepsi saja dan suatu perbuatan dalam politik. Dorongan dari dalam diri yang kuat dapat memberikan bukti potensi dan kemampuan mereka sebagai individu dalam memperjuangkan peran politik yang lebih besar. Dengan demikian peneliti berpendapat bahwa faktor kemauan dari kaum Perempuan dapat mempengaruhi kesadaran kaum perempuan akan pentingnya partisipasi dalam pemilihan umum. Dimana kaum perempuan memiliki kemauan untuk ikut berpartisipasi pada saat pemilihan umum tersebut tanpa adanya paksaan dari orang lain.

## **Faktor Eksternal**

### **1. Faktor Budaya**

Data lapangan menunjukkan bahwa Faktor budaya dapat mempengaruhi keaktifan kaum Perempuan dalam pemilihan umum. Dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber di lapangan kaum perempuan mengatakan bahwa Faktor budaya memberikan dorongan dan mendukung segala kegiatan yang dilakukan kaum perempuan apapun itu yang intinya masih mengandung nilai positif agar kaum Perempuan terus aktif dalam segala kegiatan khususnya dalam pemilihan umum. Adapun Kendala yang mendasar yang dihadapi kaum perempuan adalah sistem patriarki yang mengakar pada kendali keluarga dan

kekuasaan pengambilan keputusan berada pada tangan laki-laki. Kepercayaan tradisional dan sikap budaya khususnya mengenai peran dan status perempuan dalam masyarakat masih kuat khususnya di daerah pedesaan. Identitas gender perempuan sebagian besar dianggap sebagai hal yang bersifat domestik dan menjadi penghalang bagi kaum perempuan untuk masuk ke dalam politik formal (Gandeguay, 2014; Yusri, 2020).

Dalam kehidupan masyarakat Indonesia masih menganut budaya patriarki dimana laki-laki berada di posisi paling atas. Sehingga posisi perempuan dalam masyarakat tidak melebihi laki-laki. Budaya seperti ini hanya berlaku pada zaman dulu, dimana laki-laki sebagai kepala sedangkan perempuan menjadi tubuh. Dalam perkembangan zaman perempuan dan laki-laki itu sama, sama duduk sejajar yang membedakan hanya jenis kelamin. Partisipasi perempuan saat ini sangat dibutuhkan dalam upaya pengintegrasian kebutuhan gender dalam berbagai kebijakan politik (Mhd. Latip Kahpi, 2024; Muhammad Ar Rafii, 2024; Nursyifa, 2023; Putrie Hanum Jayani, Fathiya Mayla Shafira, Satria Anindya, 2024). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa faktor budaya harus terus memberi dukungan kepada kaum Perempuan agar mereka terus berperan aktif dalam segala kegiatan politik serta mendukung pelaksanaan kegiatan yang di adakan oleh kaum perempuan karena itu merupakan suatu motivasi bagi Perempuan untuk terdorong lebih aktif dalam kegiatan partisipasi politik di kemudian harinya.

## **2. Faktor Peran Lokal**

Data lapangan menunjukkan bahwa faktor budaya juga mempengaruhi pemberdayaan Perempuan. Berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan bahwa faktor peran lokal juga mendukung partisipasi politik Perempuan. Yang dimana kaum perempuan mengatakan bahwa dengan adanya dukungan dari faktor lingkungan dapat menambahkan rasa kepercayaan diri kaum Perempuan, tetapi ada juga kaum Perempuan yang mengatakan bahwa faktor peran lokal atau lingkungan juga harus memberikan sosialisasi terkait pentingnya Perempuan berpartisipasi dalam pemilihan umum, agar kaum perempuan lebih terdorong untuk berpartisipasi lagi di kegiatan pemilihan umum selanjutnya (Medina, 2023; Nursyifa, 2023; Putrie Hanum Jayani, Fathiya Mayla Shafira, Satria Anindya, 2024; Rusta et al., 2024).

Faktor ini merujuk pada berbagai kondisi yang mempengaruhi peran, serta kontribusi Masyarakat khususnya kaum perempuan dalam suatu konteks tertentu, seperti pembangunan, kebijakan publik, lingkungan dan budaya. Tingkat keterlibatan kaum perempuan dalam proses pengambilan Keputusan dan pelaksanaan suatu kegiatan ini memiliki pengaruh agar pelaksanaan suatu program dapat berjalan dengan baik. Faktor peran lokal dapat memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap partisipasi politik perempuan. Pengaruh yang diberikan yaitu masyarakat lokal harus memberikan dorongan atau motivasi agar kaum perempuan terus semangat dalam segala kegiatan proses politik, dengan masyarakat lokal memberikan dorongan terhadap kaum perempuan terkait partisipasi politik perempuan maka keterlibatan kaum perempuan dalam segala proses politik akan semakin lebih besar. Faktor peran lokal ini sangat menentukan seberapa siap kaum perempuan dalam hal pengetahuan dan keterampilan politik untuk ikut serta dalam segala proses politik. Maka dari itu dukungan dari Tingkat lokal dapat meningkatkan keterampilan kaum perempuan dalam politik, melalui faktor peran lokal ini juga dapat meningkatkan dan mendorong partisipasi politik perempuan sehingga menciptakan lingkungan politik yang baik (Mhd. Latip Kahpi, 2024; Nursyifa, 2023; Rusta et al., 2024).

Dari hasil wawancara dengan kaum perempuan di Desa Rana Gapang peneliti menyimpulkan bahwa Masyarakat terlebih khusus kaum perempuan membutuhkan bimbingan dari pemerintah atau memberikan sosialisasi berkaitan dengan kesetaraan gender

antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender ini dimana kaum perempuan juga bisa ikut terlibat dalam partisipasi di lingkungan masyarakat. Pemerintah harus memberikan pencerahan untuk kaum perempuan agar terlibat dalam partisipasi politik dalam masyarakat. Masyarakat yang tinggal di daerah pedalaman masih berpikir bahwa, segala sesuatu yang berkaitan dengan politik hanya dilakukan oleh kaum adam. Maka pemerintah harus memberikan sosialisasi di setiap daerah untuk mematahkan pemikiran-pemikiran yang beranggapan bahwa kaum perempuan tidak bisa ikut serta dalam dunia politik.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa partisipasi perempuan dalam pemilihan calon legislatif 2024 di Desa Rana Gapang, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi pendidikan, dukungan keluarga, dan kemauan dari dalam diri. Pendidikan memainkan peran penting dalam meningkatkan partisipasi perempuan, memberikan pemahaman mengenai pentingnya pemilu dan mendorong keinginan untuk terlibat aktif. Dukungan keluarga memberikan semangat dan penghargaan terhadap keputusan perempuan, sehingga mendorong mereka untuk lebih aktif dalam kegiatan politik. Selain itu, kemauan individu menjadi dorongan signifikan yang memotivasi perempuan menggunakan hak suara mereka. Faktor eksternal mencakup budaya dan peran lokal. Budaya yang mendukung memberikan ruang bagi perempuan untuk terlibat dalam kegiatan yang bermanfaat, termasuk partisipasi politik. Peran lokal, seperti kampanye dan sosialisasi, juga menjadi pendukung signifikan, meskipun perempuan mengharapkan lebih banyak program sosialisasi yang berfokus pada pentingnya partisipasi mereka dalam politik.

Berdasarkan temuan ini, terdapat beberapa rekomendasi. Pertama, perempuan diharapkan semakin aktif dalam kegiatan politik, memahami pentingnya kesetaraan gender, dan menyadari bahwa peran mereka tidak hanya terbatas pada tugas domestik tetapi juga dalam ranah politik. Kedua, pemerintah perlu rutin melakukan sosialisasi, setidaknya setahun sekali atau menjelang pemilu, untuk menekankan pentingnya partisipasi perempuan dalam politik. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran bahwa perempuan memiliki hak untuk memilih dan dipilih. Akhirnya, penelitian lanjutan disarankan untuk mengkaji lebih mendalam berbagai isu terkait partisipasi perempuan dalam politik, termasuk hambatan dan peluang yang dihadapi, guna memberikan wawasan yang lebih luas dan solusi yang lebih komprehensif terhadap permasalahan partisipasi politik perempuan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ma'Arij, H., Tamrin, & Putri, I. A. (2023). Faktor-Faktor Penyebab Partisipasi Perempuan Calon Anggota Legislatif Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Sungai Penuh. *Jurnal Suara Politik*, 2(2), 40–44.
- Annisa Risky Zuniati, Raisha Maulidza, Najwa Sabilla, A. U. (2024). Komparasi Implementasi Partisipasi Perempuan dan Sistem Pemilu di Negara Indonesia dan Australia. *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerit*, 10(1), 100–112. <https://jurnal.unsil.ac.id/index.php/jipp/article/view/10862%0Ahttps://jurnal.unsil.ac.id/index.php/jipp/article/viewFile/10862/3566>
- Aperta Safatullah, A., Chofa, F., Vahlepi, M., Mulia Saputra, E., Hikmara, M. A., & Kholdaa, M. (2024). Merebut Panggung Politik: Menelisik Partisipasi Perempuan Dalam Pemilu Legislatif di Kecamatan Payakumbuh Timur Tahun 2024. *Politica: Jurnal*

- 
- Hukum Tata Negara Dan Politik Islam*, 11(1), 10–20.  
<https://doi.org/10.32505/politica.v11i1.8228>
- Astari, P. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Perempuan dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 2(1), 33–45.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.47995/jian.v2i1.30>
- Budiardjo, M. (2007). DASAR-DASAR ILMU POLITIK. In *Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama* (I, Vol. 1, Issue 1).
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi)*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Dewi Purnamasari. (2021). *Partisipasi Politik Perempuan Dalam Pemilihan Legislatif Tahun 2019 ( Studi Kasus Perwira Nurul Huda Desa Teluk Panji I Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Skripsi Oleh : Dewi Purnamasari Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Medan Area Med. 2019.*
- Frans Bapa Tokan, Apolonaris Gai, Y. N. (2020). PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN (Studi tentang Relasi Kuasa dan Akses Perempuan dalam Pembangunan Desa di Desa Watoone - Kabupaten Flores Timur). *Jurnal Caraka Prabhu*, 4(2), 206–225.  
<https://doi.org/10.36859/jcp.v4i2.298>
- Gandeguay, J. K. (2014). PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI DISTRIK MIMIKA BARU KABUPATEN MIMIKA PROVINSI PAPUA TENGAH. *Thesis IPDN*, 1–7.
- Hamdani, K., Mar Iyah, K., & Ramadhani, A. N. A. (2023). Menakar Konstruksi Proporsional Tertutup dan Kebijakan Afirmatif Perempuan di Parlemen. *Nomokrasi LeDHaK Fakultas Hukum Unhas*, 1(1), 22–40.
- Hananda Avivah, A. H. (2023). Peran Masyarakat dalam Partisipasi Politik Menghadapi Pemilihan Umum tahun 2024. *Jurnal Mahasiswa Karakter Bangsa (JMKB)*, 3(1), 14–21.
- Hariyanti, H., Darmawan, C., & Masyitoh, I. S. (2018). Peran partai politik dalam meningkatkan partisipasi politik kader perempuan melalui pendidikan politik. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 15(1), 74–85.  
<https://doi.org/10.21831/jc.v15i1.17659>
- Hasan, M. (2022). Media penelitian kualitatif. In *Tahta Media Group* (Vol. 1).  
<http://belajarpsikologi.com/metode-penelitian-kualitatif/>
- Hatta Azzuhri, Tiara Ningsih, Kun Budiarto, Y. O. D. (2018). PARTISIPASI POLITIK PEMILIH PEMULA DI DESA SUKARAJA KECAMATAN SUKAMERINDU KABUPATEN LAHAT SUMATERA SELATAN. *Jupis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 44. <https://doi.org/10.24114/jupis.v10i1.8385>
- Iman, W. O. N. (2023). Peran Masyarakat Dan Kuota Perempuan Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024. *Journal Publicho*, 6(1), 151–160.  
<https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i1.100>
- Inwantoro, T., . Y., & Herawati, N. R. (2014). No Title. *Journal of Politic and Government Studies; VOLUME 3, NOMOR 3, TAHUN 2014.*  
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/5776>
- Khalisa Aisyah Signora, Mukhlis, Azzahra Al Adawiyah, Vina Noura, Fifia El Zuhra, Dyva

- Patricia Siahaan, Siti Nurhaliza Fardani, Supangge Tiara, Puteriyani Khairunnisa, Asni Zahara1, & Della Dwi Syahpira. (2023). Sistem Demokrasi Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia. *Educandumedia: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Kependidikan*, 2(1), 1–22. <https://doi.org/10.61721/educandumedia.v2i1.193>
- Liando, D. M. (2016). Pemilu dan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi Pada Pemilihan Anggota Legislatif Dan Pemilihan Presiden Dan Calon Wakil Presiden Di Kabupaten Minahasa Tahun 2014). *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, 3(2), 14–28.
- Mahmudah, H. (2023). Perempuan Dan Pemilu Di Indonesia Perspektif Hukum Islam. *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 7(1), 68–82. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v7i1.1355>
- Mas'ood, M., & Savirani, A. (2017). Financing Politics in Indonesia. *PCD Journal*, 3(1–2), 63. <https://doi.org/10.22146/pcd.25741>
- Medina, M. C. (2023). The feminization of resistance: the narratives of #NiUnaMenos as social transformative action. *Journal of Political Power*, 16, 237–253. <https://doi.org/10.1080/2158379X.2023.2251109>
- Mhd. Latip Kahpi, A. H. (2024). Analisis Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia: Faktor Penghambat dan Pendorong. *Jurnal Kajian Gender Dan Anak*, 8(1), 64–77. <https://doi.org/10.24952/gender.v8i1.11067>
- Mohtar Mas'ood, C. M. (2021). *Perbandingan Sistem Politik* (21st ed.). UGM Press.
- Muhammad Ar Rafii, E. J. (2024). Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan Dalam Keterwakilan di Legislatif. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 1(2), 87–99. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i2.75>
- Nurbaiti, L. (2019). KESADARAN POLITIK DAN PARTISIPASI POLITIK (Pengaruh Tingkat Kesadaran Politik Terhadap Partisipasi Politik Pemilih Pemuda Kelurahan Tajur Pada Pilkada Kota Tangerang Tahun 2018). *PROGRAM STUDI ILMU POLITIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH*, 105.
- Nurdin. (2021). Keterwakilan Politik Perempuan Di Parlemen Periode 2019-2024: Peran Partai Politik. *PARAPOLITIKA: Journal of Politics and Democracy Studies*, 2(2), 129–145. <https://doi.org/10.33822/jpds.v2i2.5912>
- Nursyifa, A. (2023). Partisipasi Perempuan dalam Politik. *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan*, 9(1), 25–35. <https://doi.org/10.58737/jpled.v4i2.287>
- Pratiwi, C. S. (2024). PEREMPUAN DAN PARTAI POLITIK: PROBLEMATIKA REKRUTMEN KADER PEREMPUAN PADA PARTAI AMANAT NASIONAL DI PROVINSI JAMBI. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 4(6), 1208–1216.
- Putri, F. D., & Putri, I. A. (2021). Partisipasi Pemilih Perempuan Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 Di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang. *Jurnal Demokrasi Dan Politik Lokal*, 3(1), 13–22. <https://doi.org/10.25077/jdpl.3.1.13-22.2021>
- Putrie Hanum Jayani, Fathiya Mayla Shafira, Satria Anindya, A. U. (2024). REPRESENTASI GENDER DI PARLEMEN PASCA PEMILU 2019: TANTANGAN DAN PELUANG MENUJU KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN POLITIK. *Kultura: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(8), 37–45. <http://jurnal.kolibi.org/index.php/kultura/article/view/1948%0Ahttp://jurnal.kolibi.org/in>

---

dex.php/kultura/article/download/1948/1879

- Rusta, A., Nafisa, A. C., Mahendra, B. I., Irawati, I., & Fajri, M. (2024). Perempuan Sebagai Pemilih : Isu Utama, Preferensi, dan Dampaknya terhadap Pemilu 2024. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 6(3), 1341–1349. <https://doi.org/10.34007/jehss.v6i3.2030>
- Sarbaini. (2015). Demokratisasi Dan Kebebasan Memilih Warga Negara Dalam Pemilihan Umum. *Jurnal Inovatif*, VIII(3), 106–117. <https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/2177/7667>
- SARMIN, I. A. M. (2024). PELUANG DAN TANTANGAN REPRESENTASI PEREMPUAN DALAM PEMILIHAN UMUM DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN 2024. *Thesis IPDN*, 15(1), 1–15. <http://eprints.ipdn.ac.id/19753/>
- Sinaga, Manotar Leryaldo, M. D. S. (2024). Pengaruh Orientasi Politik terhadap Partisipasi Perempuan Muda pada PILPRES 2024 (Studi Empiris terhadap Pilihan Politik Mahasiswa Fakultas Bahasa dan Seni Unimed). *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia*, 1(3), 118–140. <https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i3.272>
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D*. Alfabeta.
- Surbakti, R. (1998). Memahami Ilmu Politik. In *PT Gramedia Widiasarana Indonesia*. PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Totok Inwantoro, Yuwanto Herawati, N. R. (2014). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI REDAHNYA TINGKAT PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN PADA PEMILU LEGISLATIF DPRD KABUPATEN MOJOKERTO 2014. *Journal of Politic and Government Studies*, 3(3), 346–355. <https://doi.org/https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/5776>
- Violin, S. A., Hussain, M. A., Maharani, D. G. H., Putri, S. T. S., DJ, S. T. A., Farizi, M. G. Al, Al Khafidhoh, L., & Dewi, R. (2024). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Pemilihan Dalam Pilpres 2024 pada Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman Angkatan 2023. *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education*, 11(1), 25–36. <https://doi.org/10.24036/scs.v11i1.595>
- Yusri, A. Z. dan D. (2020). Kemenangan Petahana Melalui Strategi Politik Pork Barrel Dalam Pemilihan Kepala Desa Ampelsari Tahun 2017. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 7(2), 809–820.